

**Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Sleman Dalam Penanggulangan Bencana di Gunung Merapi
(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Hunian Tetap Dongkelsari)**



NASKAH PUBLIKASI

**Disarikan dari Skripsi yang Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh
BRILLIANT AYESHA NADINE A NARRA
NIM. 13321138

MUZAYIN NAZARUDDIN, S.Sos., MA
NIDN 0516087901

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**POLA KOMUNKASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI GUNUNG
MERAPI
(STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF PADA HUNIAN TETAP DONGKELSARI)**

Naskah Publikasi

**POLA KOMUNKASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI GUNUNG MERAPI
(STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF PADA HUNIAN TETAP DONGKELSARI)**

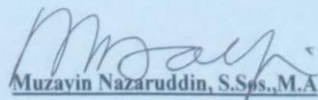
Disusun oleh:

BRILLIANT AYESHA NADINE A NARRA

13321138

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi pada tanggal 23 JAN 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,


Muzavin Nazaruddin, S.Sos.,M.A
NIDN 0516087901

Mengetahui

Ketua Proram Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Muzavin Nazaruddin, S.Sos.,M.A
NIDN 0516087901

**Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Sleman Dalam Penanggulangan Bencana di Gunung Merapi
(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Hunian Tetap Dongkelsari)**

Brilliant Ayesha Nadine A Narra

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII,
Menyelesaikan studi pada tahun 2018

Muzayin Nazaruddin

Kepala Prodi Ilmu Komunikasi FPSB UII

Abstract:

Disaster after disaster has hit the region in Indonesia. One of the natural disasters that become subscriptions to the country of Indonesia is the volcano eruption. Mount Merapi is one of the most active volcanoes located in Central Java. And within the circle of Mount Merapi, Sleman is one of the areas affected by the eruption of Mount Merapi with a considerable number of victims. This study focuses on the existing disaster prevention communication pattern in Mount Merapi. This research has found some important findings. The model of communication pattern that BPBD Sleman uses is a combination of chain model (chain) and free network model (all channel). Where the BPBD Sleman do the dissemination of information in a structured, appropriate path upward bureaucracy to BPPTKG Yogyakarta to obtain information of Mount Merapi and downward to officials, District Government, District, Village Government, village heads, volunteer community, then information to community for the delivery of information in chains. However, there is also a non structured communication channel where BPPTKG Yogyakarta as a source of disaster information Mount Merapi disseminate disaster information through various mediums to get directly to the community without going through the bureaucratic structure. The most commonly used medium is WhatsApp. This is relevant to the communication pattern of chain models and free networks.

Key words: disaster communication, communication pattern, mount merapi

A. Pendahuluan

Rentetan bencana demi bencana telah melanda wilayah di Indonesia. Beberapa bencana alam tersebut seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung, gempa bumi, kemarau berkepanjangan hingga tsunami. Hal ini menyebabkan

Indonesia dikenal oleh dunia luar sebagai negara yang rawan akan bencana alam. Salah satu bencana alam yang menjadi langganan negara Indonesia adalah gunung meletus.

Gunung api memiliki potensi bencana yang cukup besar pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat. Indonesia setidaknya tercatat memiliki 127 gunung aktif (<http://www.beritasatu.com/nasional/296381-bnpb-dari-127-gunung-aktif-di-indonesia-3-masih-meletus.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 09.17 WIB). Salah satu gunung api yang ada di Indonesia adalah Gunung Merapi yang terdapat di wilayah Jawa Tengah tepatnya pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada abad ke-20 saja, Gunung Merapi sedikitnya telah terjadi 28 kali letusan, dengan letusan terbesar terjadi pada tahun 1931. Selanjutnya, tercatat kembali terjadi letusan yang cukup besar pada tahun 1961 dan 2010 (<http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/542-g-merapi?start=1>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB).

Pada tanggal 26 Oktober 2010, kembali terjadi letusan Gunung Merapi yang disertai awan panas serta dentuman secara berkala, hingga pada tanggal 5 November 2010 terjadi erupsi besar. Sesaat setelah erupsi terjadi, sirine tanda bahaya berbunyi, mengakibatkan warga yang mulai panik berlarian keluar rumah untuk mengevakuasikan diri menuju tempat evakuasi yang disediakan yaitu Stadion Maguwoharjo dan Gedung Olah Raga (GOR) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (<http://m.tribunnews.com/amp/regional/2010/11/05/inilah-kronologi-letusan-dahsyat-merapi-di-jumat-pagi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 10.01 WIB).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 347 korban jiwa akibat erupsi Gunung Merapi 2010 tersebut. Korban jiwa rata-rata menimpa warga yang berada di sekitar Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali. Adapun jumlah pengungsi mencapai 410.388 orang (<http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/542-g-merapi?start=1>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 09.45 WIB).

Menurut seorang pengamat, Budhi Kuswan Susilo, dalam tulisannya di *kompasiana*, ada dua hal menarik dari kejadian erupsi Gunung Merapi 2010 yang

pertama ditinjau dari respon yang dilakukan pemerintah dan yang kedua ditinjau dari kepercayaan masyarakat terhadap bencana erupsi Gunung Merapi. Pemerintah, dalam menangani bencana menetapkan adanya aktivitas Gunung Merapi atas dasar pemantauan yang dilakukan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta. Kemudian pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan evakuasi ke tempat yang telah disediakan. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang sudah dievakuasi, kembali beraktivitas di desa mereka karena mereka meyakini belum ada tanda-tanda pasti Gunung Merapi akan segera meletus. Selain itu, Mbah Maridjan yang dipercaya masyarakat sebagai juru kunci yang menjaga Gunung Merapi, belum mendapatkan firasat Gunung Merapi akan meletus (Susilo, http://www.kompasiana.com/budhikuswansusilo/letusan-gunung-merapi-antara-mitigasi-bencana-dan-keyakinan-masyarakat_55003ac5813311e118fa7312, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 10.45 WIB).

Dari fakta-fakta yang ada, seharusnya pemerintah memiliki alur komunikasi dalam memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat secara akurat dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan upaya penyelamatan masyarakat saat terjadi bencana. sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5).

Selain itu, masyarakat memiliki hak seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 huruf (b) yaitu, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan pasal 26 ayat 1 huruf (c) yaitu, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 26, ayat 1, bagian b dan c).

Dari berbagai uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana alur informasi yang diterapkan pemerintah terkait kebencanaan dan pola konsumsi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah. Adapun pembatasan pola komunikasi bencana dalam penelitian ini yaitu hanya pada

bencana erupsi Gunung Merapi 2010 yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di sini peneliti tertarik untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat dalam memberikan dan menyebarkan informasi kebencanaan yang terjadi di Gunung Merapi. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yang hendak dijawab yaitu permasalahan :

1. Bagaimana alur komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman dalam upaya penyebaran informasi kebencanaan dan penanggulangan bencana di Gunung Merapi?
2. Apa model pola komunikasi yang digunakan BPBD Sleman?

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang hendak dijawab, penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Menjelaskan alur komunikasi yang digunakan BPBD Sleman dalam penyebaran informasi kebencanaan dan penanggulangan bencana di Gunung Merapi.
2. Menjelaskan model pola komunikasi yang digunakan BPBD Sleman dalam penyebaran informasi kebencanaan dan penanggulangan bencana di Gunung Merapi.

B. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu sebagai referensi. Dengan tujuan untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang memadai sehingga penulisan skripsi ini lebih memadai. Selain itu, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghargai berbagai perbedaan yang ada serta cara pandang mengenai objek-objek tertentu, sehingga meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah suatu yang wajar untuk saling melengkapi berdasarkan studi pustaka, peneliti menemukan beberapa referensi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Berikut ini penelitian terdahulu yang terkait dan menjadi bahan acuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan :

Penelitian terdahulu yang pertama, peneliti ambil dari penelitian internasional yang dilakukan oleh Dwie Irmawaty Gultom dan Zita Joyce dengan judul penelitian “*Crisis Communication Capacity for Disaster Resilience : Community Participation of Information Providing and Verifying in Indonesian Volcanic Eruption*”, Jurusan *Media and Communication, University of Canterbury, New Zealand*. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana komunitas Jalin Merapi merangkul kapasitas masyarakat lokal dalam menyediakan, berbagi, dan memberikan informasi pada saat erupsi Merapi 2010 (Gultom and Joyce, http://www.communityresearch.org.nz/wp-content/uploads/formidable/Crisis_communication_capacity_for_disaster_resilience.pdf, diakses pada tanggal 16 September 2017, pukul 16.16 WIB).

Metode yang digunakan Gultom dan Joyce adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan fokus kelompok di empat kabupaten yang ada disekitar Gunung Merapi. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunitas Jalin Merapi mampu menggabungkan antara kapasitas masyarakat, radio komunitas dan kemampuan media sosial yang berhasil menyebarkan informasi Gunung Merapi ke masyarakat luas, khususnya masyarakat lokal. Sehingga hal ini membantu meringankan adanya informasi krisis yang terjadi di masyarakat dan membuat masyarakat lebih mengandalkan informasi dari Jalin Merapi daripada dari informasi yang diotorisasi (Gultom and Joyce, http://www.communityresearch.org.nz/wp-content/uploads/formidable/Crisis_communication_capacity_for_disaster_resilience.pdf, diakses pada tanggal 16 September 2017, pukul 16.31 WIB).

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Firman Wahyudi dengan judul jurnal “Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Dalam Mencegah dan Menanggulangi Bencana Asap di Riau”, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam mencegah dan menanggulangi bencana asap di Riau (Wahyudi, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016 : 1-15).

Metode yang digunakan Wahyudi adalah metode deskriptif kualitatif yang mana menekankan penjelasan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola komunikasi BPBD Riau dalam mencegah bencana asap yaitu pola roda. Pola roda yang digunakan BPBD Riau saat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BMKG dan BLH. Pola roda juga digunakan saat tanggap darurat, bahwa ada pimpinan yang memberi perintah dan arahan yang jelas dalam proses penyampaian pesannya (Wahyudi, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016 : 1-15).

Selanjutnya, penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Puji Lestari, Ica Dwi Putri Br Sembiring, Agung Prabowo, Arif Wibawa, dan Retno Hendariningrum dengan judul jurnal “Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat”, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen komunikasi bencana yang berlangsung saat tanggap darurat pada bencana Gunung Sinabung 2010, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Lestari, Puji, dkk, Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Vol. 10 No. 2, Desember,2013 : 139-158).

Metode yang digunakan Lestari, dkk adalah metode deskriptif, interpretatif, dan evaluatif dengan teknik deskriptif kualitatif. Dimulai dari penyajian data, reduksi, pembuatan kategorisasi, interpretasi dan simpulan, dan kebijakan berupa model manajemen komunikasi bencana. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus menentukan jalur evakuasi dan tempat pengungsian bagi warga, serta mendidik warga dan menyadarkan warga akan bahaya bencana serta membuat SOP untuk mengatur tindakan yang harus dilakukan warga, perlunya kerjasama antara pemerintah dengan warga dalam menentukan kebutuhan yang dilihat dari kapasitas warga, dan membuat rencana kontijensi untuk setiap ancaman bahaya bencana (Lestari, Puji, dkk, Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Vol. 10 No. 2, Desember,2013 : 139-158).

Letak kebaruan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah peneliti ingin menggali bagaimana pola komunikasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi secara komprehensif mempertimbangkan aktor, pesan, dan media yang terlibat di dalamnya. Peneliti memilih untuk menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi yang diambil dari informan yang menjadi subjek peneliti. Subjek penelitian yang peneliti ambil yaitu dari BPBD Sleman, BPPTKG Yogyakarta, Komunitas CRI, serta kepala dukuh dan warga Huntap Dongkelsari. Peneliti mengacu pada teori yang tergolong teori baru, yaitu teori komunikasi bencana.

2. Kerangka Teori

a. Pola Komunikasi

Menurut Djamarah (2004), pola komunikasi adalah pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Dalam pola komunikasi ini, peneliti menggunakan model komunikasi Stephen P. Robbins yang dikemukakan dalam bukunya, *Organization Behaviour: concepts, controversies and applications*. Second Edition, Prentice-Hall, inc., Englewood Cliffs, New Jersey (1983). Adapun terdapat lima model pola komunikasi dalam model komunikasi Robbins, yaitu model rantai (*chain*), model roda (*wheel*), model lingkaran (*circle*), model bebas (*all channel*), dan model huruf “Y” (Rosady, 1998 : 94).

Model rantai (*chain*) merupakan mode yang menganut hubungan komunikasi garis langsung (komando), baik ke atas maupun ke bawah tanpa terjadi suatu persimpangan. Model roda (*wheel*) adalah model pola komunikasi yang menjadikan semua laporan, instruksi, perintah kerja dan pengawasan terpusat pada satu orang pemimpin dengan empat atau lebih bawahan dan tidak terjadi interaksi (Rosady, 1998 : 94).

Model lingkaran (*circle*) adalah model dimana semua anggota dan stafnya dapat terjadi interaksi pada setiap tiga tingkatan hirarki. Model

bebas (*all channel*) adalah model pengembangan dari model lingkaran (*circle*). Model huruf “Y” adalah model pola komunikasi yang tidak jauh berbeda dengan model rantai (*chain*), dimana terdapat level jenjang hirarki (Rosady, 1998 : 94).

b. Penanggulangan Bencana

Menurut Susanto (2011 : 87), bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat faktor alam atau manusia yang mengganggu tatanan kehidupan, misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, teror bom, dan lain-lain.

Adapun siklus-siklus erupsi Gunung Merapi yakni siklus pendek dua sampai lima tahun, siklus menengah lima sampai tujuh tahun, dan siklus panjang hingga 100 tahun (Surono, *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, Vol. 241-242, Oktober 2012 : 121-135).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana juga terbagi atas tiga tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dimana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 34 menyatakan bahwa prabencana meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 35 disebutkan bahwa dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 menyatakan bahwa saat tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Dan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 57 menyatakan bahwa pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Pasal 4 bagian c mengatakan bahwa pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas dan rekomendasi teknis mitigasi bencana Gunung Merapi.

Rencana penerapan program *sister village* pada suatu wilayah dilakukan kajian secara fisik dan sosial. Secara fisik diperlukan penentuan desa-desa penerima untuk desa-desa rawan, sedangkan secara sosial dilakukan kajian terhadap respon masyarakat untuk rencana penerapan program *sister village* (Astriani, 2017 : 3).

c. Komunikasi Bencana

Berkaitan dengan bencana, komunikasi dapat berfungsi sebagai radar sosial yang memberi kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana di suatu tempat. Dalam hal ini, komunikasi dikhususkan pada kegiatan pra bencana yang meliputi kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi. Seperti memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kapan diadakan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana, kesiagaan yang diperlukan dan persiapan apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi adanya korban jiwa dan kerugian harta benda (Swandewi, <https://www.scribd.com/doc/283167346/Manajemen-Sistem-Informasi-Dan-Komunikasi-Dalam-Bencana#>, diakses pada tanggal 22 September 2017 pukul 19.09).

Lestari (dalam Budi (Ed.) 2011 : 99) menyatakan bahwa koordinasi penting untuk menghindari kesimpangsiuran, tumpang tindih, keterlewatan bantuan dan kekeliruan penafsiran kondisi.

Becker (2011) dalam (Davis dan Kapur, International Journal of Emergency Medicine, Maret 2014 : 1-7), komunikasi bencana telah

dikritik karena kesiapsiagaan komunikasi masih terbelakang. Mackway dan Carley (2012) dalam (Davis dan Kapur, *International Journal of Emergency Medicine*, Maret 2014 : 1-7), seorang ahli dari *delphi study* menyatakan masih kurangnya pemahaman tentang komunikasi, mengidentifikasi komunikasi sebagai prioritas utama untuk penelitian manajemen bencana lebih lanjut.

Mushkatel dan Weschler (1985) dalam (Nakamura, Umeki, dan Kato, *Journal Science Direct, Part B*, Agustus 2016 : 235-243) menyatakan bahwa tata kelola manajemen darurat harus dibagi di berbagai tingkat pemerintahan dan di antara berbagai sektor, sehingga mengurangi beban pada satu agensi tunggal. Selain itu, kapasitas lokal dan masyarakat harus ditingkatkan, karena manajemen darurat metropolitan beroperasi terutama pada tingkat ini.

Dalam jurnal (Nurdin, *Jurnal Simbolika*, No.1, April 2015 : 51-61) mengatakan bahwa selain informasi mengenai adanya potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutan pada saat pra bencana.

Menurut (Nurdin, *Jurnal Simbolika*, No.1, April 2015 : 51-61), pada saat tanggap darurat komunikasi sangat dibutuhkan sebagai fungsi manajemen dan koordinasi antara pemerintah, korban, masyarakat, relawan, dan media massa untuk informasi kondisi terkini.

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian deskriptif yang mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Penelitian ini peneliti lakukan dalam kurun waktu 10 bulan (Maret 2017 – Desember 2017).

Narasumber atau informan dalam penelitian ini yang peneliti ajukan ada tiga tipe, yaitu pemerintah, komunitas relawan, dan masyarakat. Dari pihak pemerintah ada empat, yaitu Heru Saptono, S.TP., MM sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Noer Cholik sebagai Staff Seksi

Gunung Merapi BPPTKG Yogyakarta, Heri Suprpto sebagai Kepala Pemerintah Desa Kepuharjo, dan Totok Sondong Hartanto sebagai Kepala Dukuh Hunian Tetap Dongkelsari. Dari komunitas relawan ada satu, yaitu Muhammad Amrul sebagai Staff Pengembangan Lumbung Komunitas dan Pengelola Manajemen Informasi Bencana CRI Yogyakarta. Dari masyarakat ada empat warga dari Hunian Tetap Dongkelsari yaitu Windarwati, Maryam, Suprpto, dan Is Lestari. Alasan peneliti memilih tiga tipe ini, karena menurut peneliti ketiga tipe inilah yang ikut berpartisipasi dalam penyebaran informasi kebencanaan di Gunung Merapi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model wawancara yang peneliti gunakan adalah model wawancara pribadi secara langsung dan terstruktur dengan narasumber. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

D. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan rumusan masalah, dalam pembahasan penelitian ini, peneliti hanya akan membahas sumber informasi kebencanaan di Gunung Merapi, isi pesan yang disampaikan kepada masyarakat, media yang digunakan untuk mempublikasikan informasi kebencanaan, dan siapa pengirim dan penerima pesan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjelaskan siapa yang menjadi sumber informasi kebencanaan di Gunung Merapi, menjelaskan apa isi pesan yang disampaikan kepada masyarakat, menjelaskan media apa yang digunakan untuk mempublikasikan informasi kebencanaan, dan menjelaskan siapa pengirim dan penerima pesan tersebut. Di sini, peneliti mengkategorikan pembahasan menjadi tiga sub-bab, yaitu : a) Penanggungjawab informasi kebencanaan Gunung Merapi, b) Mitigasi pra bencana Gunung Merapi, c) Pola komunikasi penanggulangan bencana Gunung Merapi.

1. Penanggungjawab Informasi Kebencanaan Gunung Merapi

Mushkatel dan Weschler (1985) dalam (Nakamura, Umeki, dan Kato, *Journal Science Direct, Part B, Agustus 2016 : 235-243*) menyatakan bahwa tata kelola manajemen darurat harus dibagi di berbagai tingkat pemerintahan

dan di antara berbagai sektor, sehingga mengurangi beban pada satu agensi tunggal. Dalam hal ini, penelitian menemukan bahwa tata kelola manajemen komunikasi bencana pada tingkat pemerintahan sudah ada. Dalam wilayah Sleman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, merupakan penanggungjawab dalam informasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BPBD Sleman telah memiliki struktur tersendiri dalam mempublikasikan informasi kebencanaan di Gunung Merapi, yaitu struktur Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops). Pusdalops tersebut bertugas memberikan informasi kepada masyarakat apabila terjadi bencana atau himbauan kepada masyarakat untuk *awareness* terhadap ancaman bencana.

Informasi bencana di Gunung Merapi, BPBD Sleman dapatkan dari Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta. Di mana BPPTKG Yogyakarta merupakan fasilitator, pengarah dan pemberi rekomendasi mengenai aktifitas Gunung Merapi kepada pemerintah, seperti BPBD Sleman. Sedangkan BPBD Sleman berperan sebagai pelaksana penanggulangan bencana dan penyebaran informasi kebencanaan agar sampai kepada masyarakat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa BPPTKG Yogyakarta juga ikut terjun langsung dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

Relasi antara BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta sudah cukup produktif. Dapat dilihat dari bagaimana keduanya saling koordinasi mengenai Gunung Merapi, baik itu berupa status maupun program-program mitigasi prabencana yang masing-masing instansi lakukan di KRB. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta saling ketergantungan dimana mekanisme yang dilakukan adalah penyebarluasan informasi status maupun ancaman Gunung Merapi.

2. Mitigasi Pra Bencana Gunung Merapi

Berkaitan dengan bencana, Swandewi dalam papernya menyatakan bahwa komunikasi dapat berfungsi sebagai radar sosial yang memberi

kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana di suatu tempat. Dalam hal ini, komunikasi dikhususkan pada kegiatan pra bencana yang meliputi kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi. Seperti memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kapan diadakan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana, kesiagaan yang diperlukan dan persiapan apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana (Swandewi, <https://www.scribd.com/doc/283167346/Manajemen-Sistem-Informasi-Dan-Komunikasi-Dalam-Bencana#>, diakses pada tanggal 22 September 2017 pukul 19.09). Penelitian ini menemukan program mitigasi pra bencana telah dijalankan seperti pelatihan dan pendidikan tentang penanggulangan bencana, baik oleh BPBD Sleman maupun BPPTKG Yogyakarta.

Program yang dijalankan BPBD Sleman diantaranya adalah Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan Desa Tangguh Bencana (Destana). Kedua program tersebut secara umum prosesnya sama, yaitu berbentuk klasikal dengan enam kali pertemuan. Seperti program SSB yang dimulai dari membentuk tim SSB, menyusun rencana kontijensi dan rencana penanggulangan bencana, kemudian diformasasikan ke dalam bentuk gladi. Dengan adanya gladi, masyarakat diuji cobakan menerapkan SOP (*Standart Operating Procedure*) yang masyarakat susun sendiri.

Dalam (Nurdin, Jurnal Simbolika, No.1, April 2015 : 51-61) mengatakan bahwa selain informasi mengenai adanya potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutan pada saat pra bencana. Berkaitan hal ini, peneliti menemukan bahwa program yang dijalankan BPBD Sleman ini belum merata di seluruh kawasan rawan bencana dan belum ada pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut, khususnya bagi sekolah-sekolah dan desa-desa yang diberi plakat sekolah siaga bencana dan desa tangguh bencana yang ada di sekitar hunian tetap Dongkelsari, pendidikan wajib latih bencana tidak diperbaharui setiap tahunnya. Di hunian tetap Dongkelsari sendiri, pendidikan dan pelatihan mitigasi pra bencana yang dilakukan BPBD Sleman dinilai kurang efisien karena hanya dilakukan

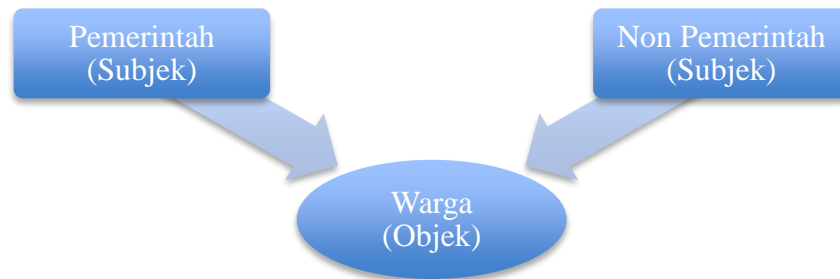
seminggu sekali selama 6 pekan dan tanpa diadakannya simulasi dengan masyarakat.

Berbeda dengan program yang dijalankan BPBD Sleman, BPPTKG Yogyakarta memiliki program yang setingkat lebih tinggi dari program wajib latih biasanya. BPPTKG Yogyakarta menginisiasikan tentang desa bersaudara yang saat ini menjadi program pemerintah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Desa bersaudara (*sister village*) merupakan daerah yang dekat dan rawan terkena dampak bencana Gunung Merapi yang kemudian disaudarakan dengan daerah yang jauh dari Gunung Merapi sebagai tempat pelarian dan pengungsian. Namun, sayangnya pada tahun 2017 ini program tersebut hanya diadakan di Klaten dan Magelang, belum dilaksanakan di daerah Cangkringan-Sleman.

Sedangkan program mitigasi pra bencana yang dilakukan komunitas *Combine Resource Institution* (CRI) tentu berbeda dengan program-program pemerintahan. CRI memiliki program edukasi terkait radio komunitas dengan komunitas Jalin Merapi tentang bagaimana menyambungkan komunitas-komunitas di lingkaran Merapi dengan teknologi informasi, manajemen di radio komunitas, pola penggunaan media yang tepat, pola penyebarluasan informasi yang benar, khususnya di wilayah sekitar jaringan komunitas Jalin Merapi. Program ini tidak hanya ditujukan kepada pengelola radio komunitas semata, namun juga lebih ke warga masyarakat yang tinggal di sekitar radio komunitas.

Becker (2011) dalam (Davis dan Kapur, *International Journal of Emergency Medicine*, Maret 2014 : 1-7), komunikasi bencana telah dikritik karena kesiapsiagaan komunikasi masih terbelakang. Peneliti membenarkan hal ini karena program-program mitigasi pra bencana yang dijalankan pemerintahan masih tergolong program wajib latih yang itu-itu saja. Sedangkan masyarakat, khususnya warga hunian tetap Dongkelsari mengaku bahwa program tersebut sudah pernah dilaksanakan dan mengharapkan adanya program tingkat lanjut dari pemerintah seperti program *sister village* untuk memudahkan warga kemana harus berlari apabila terjadi bencana.

Peneliti menemukan bahwa pada konteks ini, baik dari sisi *government* maupun *non government*, masyarakat diposisikan sebagai objek bukan subjek dalam penanggulangan bencana, sehingga masyarakat tidak mengetahui ancaman bencana di kawasan mereka dan tidak mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi ancaman bencana.



Gambar 4.1 Warga diposisikan sebagai objek

3. Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Gunung Merapi

Pola komunikasi adalah pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004). Komunikasi berawal dari gagasan yang ada pada seseorang, gagasan tersebut diolah menjadi menjadi pesan lalu dikirim melalui media tertentu kepada orang lain sebagai penerima pesan.

Terkait menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan model komunikasi Stephen P. Robbins dengan lima model, yaitu model rantai (*chain*), model roda (*wheel*), model lingkaran (*circle*), model bebas (*all channel*), dan model huruf “Y” (Rosady, 1998 : 94). Dengan ini, peneliti membagi pembahasan pola komunikasi menjadi dua bagian, sebagai berikut :

a. Pola Komunikasi Model Rantai (Chain) dan Model Jaringan Bebas (*All Channel*) Pada Masa Normal Gunung Merapi

Pada masa normal Gunung Merapi, mitigasi pra bencana merupakan salah satu tahap pencegahan resiko bencana dalam upaya

penanggulangan bencana. Untuk itu penting bagi pemerintah mempublikasikan informasi seputar Gunung Merapi untuk menghindari masyarakat dari informasi yang tidak benar. Dalam tahap pencegahan resiko bencana ini, BPBD Sleman selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, diantara adalah BPPTKG Yogyakarta, BNPB Pusat, dan Bupati Sleman.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi pasal 4 huruf c mengatakan yaitu, “pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas dan rekomendasi teknis mitigasi bencana Gunung Merapi”. Berdasarkan pasal tersebut, BPPTKG Yogyakarta diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi dan mempublikasikan informasi mengenai status Gunung Merapi.

Penelitian ini menemukan bahwa BPPTKG Yogyakarta melakukan analisis Gunung Merapi satu kali dalam seminggu yaitu setiap hari Jum'at sore apabila status Gunung Merapi normal untuk diinformasikan ke instansi lain dan masyarakat. Lestari (dalam Budi (Ed.) 2011 : 99) menyatakan bahwa koordinasi penting untuk menghindari kesimpangsiuran, tumpang tindih, keterlewatan bantuan dan kekeliruan penafsiran kondisi. Berhubung Gunung Merapi sudah 7 tahun tidak ada letusan besar, maka banyak isu-isu *hoax* yang beredar seputar Gunung Merapi di kalangan masyarakat. Untuk itu, pada masa normal sekalipun, BPPTKG Yogyakarta mempublikasikan informasi hasil analisis Gunung Merapi yang dilakukan setiap satu minggu sekali dari BPPTKG Yogyakarta yang paling utama diinformasikan.

Di sini, BPPTKG Yogyakarta merupakan sumber informasi yang resmi dan formal terkait Gunung Merapi. Informasi yang dikeluarkan BPPTKG Yogyakarta, akan disampaikan ke BNPB dan/atau BPBD secara langsung.

Hasil dari koordinasi antara BPPTKG Yogyakarta dan BPBD Sleman tersebut dijadikan sebagai dasar pembuatan dan perencanaan

kegiatan khususnya dalam pencegahan resiko bencana. BPPTKG Yogyakarta bertugas sebagai unsur pengarah dan memberikan rekomendasi kepada BPBD Sleman yang sebagai unsur pelaksana melalui koordinasi terstruktur.

Selain komunikasi secara langsung, baik BPBD Sleman maupun BPPTKG Yogyakarta juga menggunakan media lain seperti *e-mail*, *fax*, *sms*, dan media sosial untuk menyampaikan informasi kebencanaan Gunung Merapi agar sampai kepada masyarakat. Hasil temuan menemukan, media yang saat ini paling sering digunakan adalah media sosial *WhatsApp*. Melalui *WhatsApp*, BPPTKG Yogyakarta dapat memberikan informasi Gunung Merapi ke berbagai pihak, seperti ke pemerintah, komunitas relawan, bahkan ke tim perangkat desa.

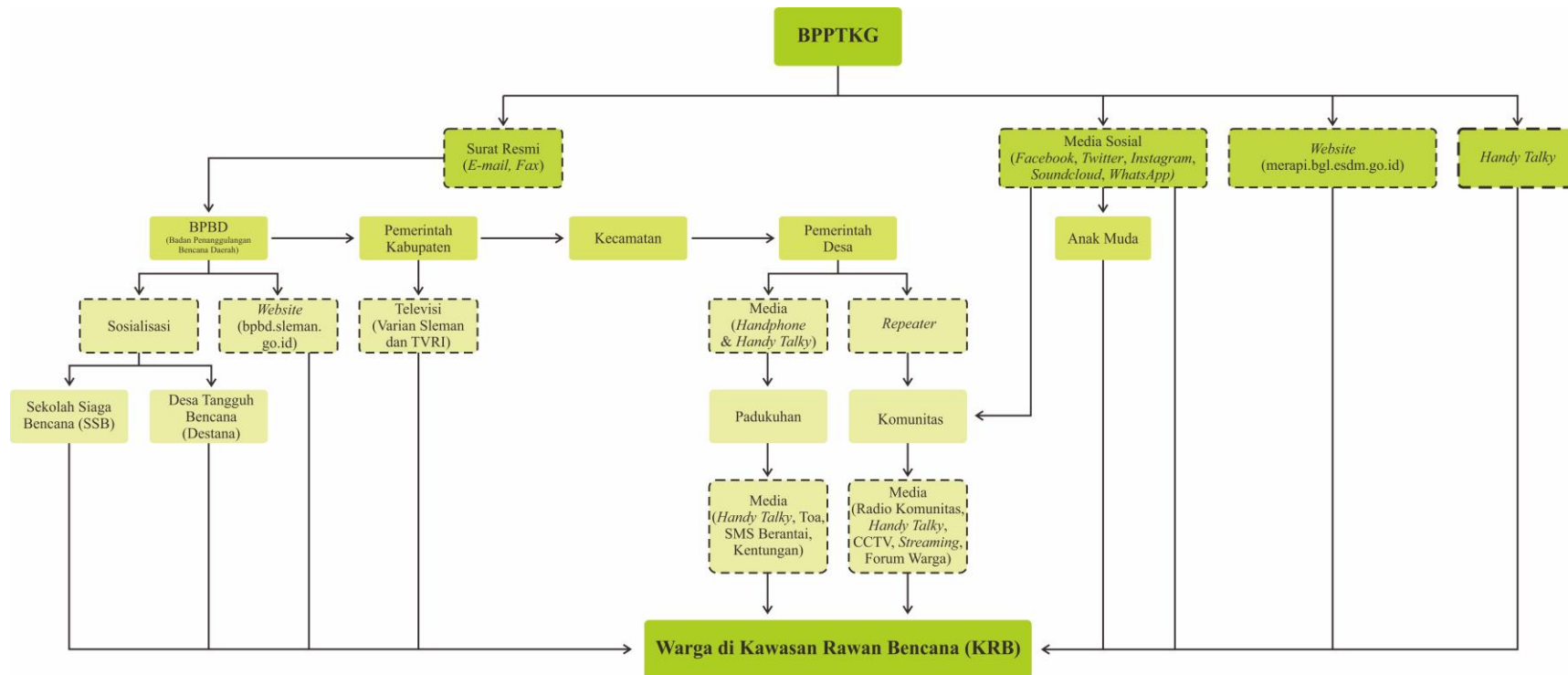
Berdasarkan temuan data, untuk informasi kebencanaan Gunung Merapi yang bersifat umum dan luas, pada dasarnya alur komunikasi masa normal Gunung Merapi dapat dikatakan berjalan sesuai struktur dan sistematis yang telah dibuat, dimana BPBD Sleman berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam pencegahan bencana. Informasi pencegahan bencana pada masa normal Gunung Merapi bersumber dari BPPTKG Yogyakarta yang kemudian diteruskan ke BPBD Sleman melalui surat resmi (*e-mail*, *fax*) dan *WhatsApp*, BPBD Sleman ke Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten ke Kecamatan, Kecamatan ke Pemerintah Desa, Pemerintah Desa ke Padukuhan dan Komunitas melalui media (*handphone*, *handy talky*, *repeater*), hingga dari Padukuhan dan Komunitas tibalah informasi ke Warga di KRB melalui berbagai media (*handy talky*, *toa*, *sms berantai*, *kentungan*, *radio komunitas*, *cctv*, *streaming*, *forum warga*) (lihat Bagan 3.2).

Komunikasi semacam ini relevan dengan pola komunikasi model rantai. Model rantai (*chain*) adalah model yang dikenal sebagai sistem komunikasi arus ke atas (*upward*) dan ke bawah (*downward*). Model ini menganut hubungan komunikasi garis langsung (komando), baik ke atas maupun ke bawah tanpa terjadi suatu persimpangan (Rosady, 1998 : 94). Jika dikaitkan dengan hasil temuan data, BPBD Sleman berada

diposisi tengah berperan sebagai pemimpin. Pemimpin yang dimaksud adalah BPBD Sleman berhak untuk menyampaikan atau tidak informasi pencegahan resiko bencana Gunung Merapi tersebut. Karena untuk urusan memberikan informasi kebencanaan Gunung Merapi, BPBD Sleman yang bertanggungjawab menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam lingkup wilayah Sleman.

Akan tetapi, hasil temuan data terdapat pula alur komunikasi masa normal Gunung Merapi yang berjalan secara non struktural. Alur komunikasi ini dilakukan oleh BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta yang mencoba menggunakan sosialisasi dan semua media yang ada untuk mempublikasikan informasi kebencanaan Gunung Merapi ke semua kalangan secara langsung, tanpa melalui struktur birokrasi yang ada (lihat Bagan 3.2).

Pada alur non struktural ini, komunikasi yang dilakukan BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta jika dilihat dari beberapa model pola komunikasi yang ada, pola komunikasinya lebih condong ke pola komunikasi model jaringan bebas (*all channel*), yaitu pola yang hampir sama dengan pola komunikasi model lingkaran (*circle*). Adapun kesamaan dengan pola komunikasi model lingkaran adalah semua tingkatan hirarki memiliki kekuatan yang sama dalam hal mempengaruhi anggota lainnya. Namun, dalam struktur pola komunikasi model jaringan bebas, semua jaringan komunikasi antar tingkatan jenjang hirarkinya tidak dibatasi dan semua staf bawahan bebas melakukan interaksi dengan berbagai pihak atau pimpinan, begitu juga sebaliknya (Rosady, 1998 : 94). Jika dikaitkan dengan temuan data, pola komunikasi BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta ini dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui perantara sosialisasi dan berbagai media, tidak melalui dan tidak terbatas pada struktur birokrasi.



Gambar 3.6 Alur Komunikasi Masa Normal Gunung Merapi
(sumber: data primer peneliti)

b. Pola Komunikasi Model Rantai (*Chain*) dan Model Jaringan Bebas (*All Channel*) Pada Masa Tanggap Darurat Gunung Merapi

Dalam masa ini, pola komunikasi penanggulangan bencana berjalan lebih cepat dan luas, karena koordinasi yang dilakukan melibatkan pemerintah, komunitas relawan, dan instansi-instansi lainnya. BPBD Sleman meminta rekomendasi dari BPPTKG Yogyakarta yang merupakan lembaga profesional untuk menentukan status eskalasi Gunung Merapi.

Berdasarkan pengalaman beberapa warga di hunian tetap Dongkelsari, peneliti menemukan bahwa masyarakat pada masa tanggap darurat masih kurang siap dan kebingungan dalam menghadapi erupsi Gunung Merapi 2010. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena penyaluran informasi yang kurang baik, kurang cepat dan tidak terorganisir baik itu informasi dari BPBD Sleman maupun dari BPPTKG Yogyakarta. Selain itu, masyarakat juga harus proaktif menanyakan pemerintah setempat seperti BPBD Sleman, BPPTKG Yogyakarta atau instansi terkait mengenai informasi seputar Gunung Merapi.

Adapun faktor lainnya adalah kurang perhatiannya masyarakat terhadap informasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik itu dari BPBD Sleman maupun dari BPPTKG Yogyakarta. Seperti dari BPPTKG yang telah menyatakan bahwa aktivitas letusan Gunung Merapi bisa saja bahkan pernah sampai ke Kecamatan Cangkringan bahkan Kota/Kabupaten Sleman. Namun, masyarakat yang sudah mengetahui hal tersebut tetap merasa tenang dan aman, sehingga pada saat erupsi Gunung Merapi terjadi, masyarakat mengungsi tanpa membawa surat-surat berharga yang telah dihimbau dari Pemerintah Desa dan hanya membawa pakaian yang dikenakan saja. Padahal daerah Cangkringan, khususnya Desa Wukirsari (kini hantap Dongkelsari) merupakan salah satu daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi 2010, dan melenyapkan permukiman yang diakibatkan oleh endapan aliran piroklastik dengan dominasi material batuan.

Berdasarkan temuan data, alur komunikasi pada masa tanggap darurat Gunung Merapi sama halnya dengan alur komunikasi pada masa normal Gunung Merapi, yaitu dapat dikatakan berjalan sesuai struktur dan birokrasi yang telah dibuat. Dimana BPBD Sleman berkoordinasi dengan instansi-instansi yang turut andil dalam tanggap darurat penanggulangan bencana Gunung Merapi. Informasi status dan tingkatan Gunung Merapi saat tanggap darurat bersumber dari BPPTKG Yogyakarta yang kemudian diteruskan ke BPBD Sleman secara langsung atau melalui *WhatsApp*, BPBD Sleman teruskan ke Perangkat Desa, Pejabat, Lurah dan Komunitas Relawan melalui (*WhatsApp, SMS gateway, handy talky*), hingga informasi sampai kepada masyarakat (lihat Bagan 3.3).

Komunikasi semacam ini relevan dengan konsep pola komunikasi model rantai (*chain*) yang menganut sistem komando agar tidak terjadinya penyimpangan informasi (Rosady, 1998 : 94). Jika dikaitkan dengan hasil temuan data, BPBD Sleman mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana setelah mendapatkan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun dari BPPTKG Yogyakarta, sehingga koordinasi yang dilakukan membutuhkan intensitas yang lebih dari koordinasi saat masa normal Gunung Merapi. BPBD Sleman meneruskan informasi tersebut secara berantai dan terorganisir kepada instansi-instansi terkait hingga sampai kepada masyarakat. Pola komunikasi yang melibatkan komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah ini relevan dengan model rantai. Dimana BPBD Sleman berada diposisi tengah yang berperan sebagai pemimpin. Pemimpin disini adalah yang bertanggungjawab dalam pemberian informasi dan peringatan dini kepada masyarakat, serta bertanggungjawab pelaksanaan penanggulangan bencana saat masa tanggap darurat seperti melakukan pengungsian bagi warga yang tinggal di KRB.

Namun, hal ini bersenjangan dengan kenyataan saat erupsi Gunung Merapi 2010 lalu. Dimana tidak terdapat koordinasi yang baik

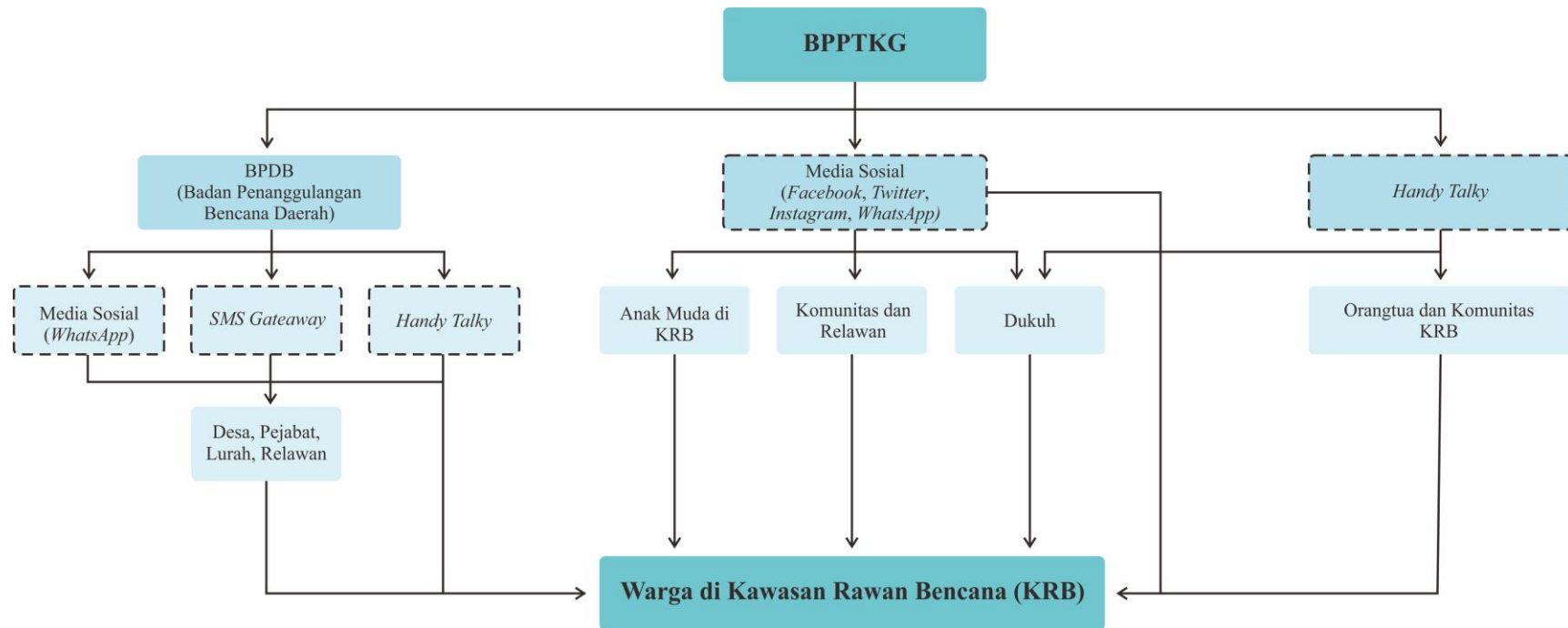
antara pemerintah (di sini BPBD Sleman) dengan warga yang tinggal di Dusun Srodokan (kini Huntap Dongkelsari). Saat erupsi terjadi, tidak adanya koordinasi lokasi tempat pengungsian dan bunyi sirine pun terlambat dibunyikan. Sehingga warga panik dan menyelamatkan

Adapun hasil temuan data, menemukan adanya alur komunikasi non struktural pada saat tanggap darurat Gunung Merapi. Alur komunikasi ini dilakukan oleh BPPTKG Yogyakarta yang menggunakan semua medium yang ada untuk menyebarkan informasi. BPPTKG Yogyakarta menyebarkan informasi bencana Gunung Merapi melalui media sosial (*facebook, twitter, instagram, WhatsApp*) untuk sasaran anak muda, komunitas relawan, dan dukuh-dukuh. Dan menggunakan *handy talky* untuk orang tua dan komunitas di KRB (lihat Bagan 3.3).

Pada alur komunikasi non struktural ini, komunikasi yang dilakukan BPPTKG Yogyakarta relevan dengan pola komunikasi model jaringan bebas (*all channel*) dapat dilihat dari alur komunikasinya yang tidak membatasi adanya interaksi antara semua jaringan tingkat hirarki yang diungkapkan oleh Stephen P. Robbins dengan terdapat timbal balik dari pesan yang disampaikan (Rosady, 1998 : 94).

Dalam temuan data, BPPTKG Yogyakarta dapat melakukan koordinasi dan memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat, dengan respon masyarakat untuk memberitahukan ke masyarakat lain serta mempersiapkan diri mengungsi di tempat ungsian yang sudah ditetapkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa alur komunikasi pada masa normal tidak selamanya dilakukan secara struktural dan sistematis, tapi juga dapat berjalan secara non struktural. Untuk itu, peneliti menemukan bahwa pada masa tanggap darurat Gunung Merapi, terdapat dua model pola komunikasi, yaitu gabungan antara model rantai (*chain*) dan model jaringan bebas (*all channel*).



Gambar 3.7 Pola Komunikasi Masa Tanggap Darurat
(sumber: data primer peneliti)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa pada saat pra erupsi Gunung Merapi tahun 2010, pemerintah tidak bisa meningkatkan kapasitas masyarakat secara maksimal. Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana tahun 2010 masih tergolong rendah karena belum lahirnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cepat tanggap menghadapi bencana di Gunung Merapi. Akan tetapi, setelah erupsi Gunung Merapi 2010, peneliti menemukan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya meningkatkan kapasitas diri cepat tanggap dalam menghadapi erupsi di masa yang akan datang. Kesadaran masyarakat ini muncul dikarenakan pengalaman masyarakat yang terkena bencana dan dampak dari erupsi Gunung Merapi 2010, bukan berdasarkan program pemerintah yang kini dijalankan. Hal ini tentu menjadi kesempatan bagi pemerintah, baik BPBD Sleman maupun BPPTKG Yogyakarta untuk mengelola dan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana secara maksimal.

Adapun pola komunikasi tanggap darurat untuk erupsi di masa yang akan datang, peneliti rangkum berdasarkan data yang peneliti peroleh yaitu sebagai berikut.



Gambar 4.2 Pola komunikasi tanggap darurat untuk masa yang akan datang

Pola komunikasi tanggap darurat untuk masa yang akan datang, dimulai dari informasi resmi dari BPPTKG Yogyakarta yang diteruskan ke BPBD Sleman, pejabat, perangkat desa, dan komunitas relawan. Kemudian diteruskan sampai ke masyarakat, khususnya yang tinggal di KRB untuk mengungsi ke posko pengungsian terdekat dari masing-masing desa/dusun yang ada di KRB atau ke *sister village* (desa bersaudara) yang telah ditentukan.

Peneliti menemukan bahwa baik BPPTKG Yogyakarta maupun BPBD Sleman telah melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan masyarakat dengan menyediakan posko pengungsian untuk masyarakat dan hewan ternaknya, serta menjalankan program *sister village* di beberapa KRB. Namun, peneliti melihat bahwa pemerintah belum maksimal dalam penyiapan lokasi pengungsian. Terkait *sister village* yang belum diterapkan secara menyeluruh di KRB, khususnya di daerah Sleman. Selain itu, tentu pemerintah perlu mengelola data penduduk di kedua desa terkait untuk mengetahui kapasitas desa, dan juga pemerintah perlu mengantisipasi untuk memfasilitasi transportasi masyarakat dari desa rawan ke desa aman.

Adanya prosedur tetap (protap) antara desa rawan dan desa aman tidak menjamin akan mengurangi kepanikan dan kesemrawutan manajemen pengungsian pada warga. Untuk itu, pemerintah harus serius dan cepat dalam mengelola program *sister village* di seluruh KRB, agar pada saat erupsi Gunung Merapi terjadi lagi, semua sudah dipersiapkan dengan matang dan meminimalisir banyaknya dampak dari erupsi.

Adapun desa aman yang ditetapkan BPBD Sleman adalah desa dengan jarak radius lebih dari 15 km. Seharusnya terdapat tiga skenario dalam kontijensi penanggulangan bencana. Apabila erupsi Gunung Merapi berdampak hanya di KRB III, erupsi Gunung Merapi mencapai radius 15 km, dan erupsi Gunung Merapi mencapai radius 20 km atau lebih. Pemerintah masih hanya mempertimbangkan erupsi kecil hingga sedang dengan daerah terdampak KRB III. Pemerintah belum memiliki

rencana mitigasi jika terjadi erupsi besar yang mencapai 15 km atau hingga 20 km.

Peneliti juga melihat, bahwa dalam program *sister village* inipun, pemerintah masih saja menjadikan warga masyarakat sebagai objek, sumber daya masyarakat tidak digunakan secara optimal. Selain itu, jarak aman yang pemerintah tetapkan memperlihatkan bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman erupsi Gunung Merapi 2010 yang termasuk letusan dengan skala besar, dimana permukiman dengan jarak radius 15 km terkena dampak bencana. Sedangkan pemerintah menetapkan *sister village* desa aman pada radius di atas 15 km. Mengingat siklus-siklus erupsi Gunung Merapi yakni siklus pendek dua sampai lima tahun, siklus menengah lima sampai tujuh tahun, dan siklus panjang hingga 100 tahun (Surono, Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 241-242, Oktober 2012 : 121-135).

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pola komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan bencana di Gunung Merapi studi deskriptif kualitatif pada hunian tetap Dongkelsari, baik pada masa normal maupun pada masa tanggap darurat memiliki dua pola komunikasi, yaitu pola komunikasi model rantai (*chain*) dan model jaringan bebas (*all channel*).

Pola komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman dalam penanggulangan bencana di Gunung Merapi pada masa normal adalah gabungan antara pola komunikasi model rantai (*chain*) dan model jaringan bebas (*all channel*). Dalam penyampaian informasi, BPBD Sleman mendapatkan informasi kebencanaan yang bersumber dari BPPTKG Yogyakarta. Jika dikaitkan dengan pola komunikasi model rantai, BPBD Sleman melakukan komunikasi langsung ke atas (*upward*) ke BPPTKG Yogyakarta dan melakukan komunikasi langsung ke bawah (*downward*) ke Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Padukuhan, dan komunitas-komunitas relawan sebelum akhirnya informasi sampai ke masyarakat. Untuk pola komunikasi model jaringan

bebas, BPPTKG Yogyakarta melakukan komunikasi timbal balik non struktural kepada masyarakat melalui berbagai media tanpa melalui jalur struktur birokrasi yang ada.

Sedangkan pola komunikasi BPBD Sleman dalam penanggulangan bencana di Gunung Merapi pada masa tanggap darurat adalah gabungan pola komunikasi model rantai dan model jaringan bebas. Jika dikaitkan dengan pola komunikasi model rantai, BPBD Sleman melakukan komunikasi langsung ke atas dengan BPPTKG Yogyakarta sebagai sumber informasi kebencanaan Gunung Merapi untuk mendapatkan informasi. Kemudian BPBD Sleman melakukan komunikasi langsung ke bawah dengan pejabat, lurah, perangkat desa, dan relawan hingga informasi sampai ke masyarakat. Untuk pola komunikasi model jaringan bebas, BPPTKG Yogyakarta melakukan komunikasi timbal balik dan menyebarkan langsung informasi tanggap darurat ke masyarakat secara non struktural melalui media sosial dan *handy talky*.

Perbedaan pola komunikasi struktural dan non struktural pada masa normal dan masa tanggap darurat adalah pada masa normal informasi cenderung lebih personal dengan mengharapkan penyebaran informasi Gunung Merapi melalui pesan berantai, sedangkan pada masa tanggap darurat informasi cenderung secara birokrasi melalui surat resmi untuk menjamin kebenaran informasi Gunung Merapi pada saat tanggap darurat. Baik pada masa normal maupun pada masa tanggap darurat, pemerintah dan non pemerintah memposisikan warga masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek.

Sumber informasi kebencanaan di Gunung Merapi dalam wilayah Sleman adalah BPBD Sleman. Informasi kebencanaan di Gunung Merapi, BPBD Sleman dapatkan dari BPPTKG Yogyakarta berdasarkan hasil analisis Gunung Merapi yang dilakukan BPPTKG Yogyakarta. Adapun isi pesan yang disampaikan pada masa normal adalah yang paling utama berupa hasil analisis Gunung Merapi yang dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) oleh BPPTKG Yogyakarta, sedangkan isi pesan pada masa tanggap darurat adalah pemberitahuan tempat pengungsian, dan pembawaan surat-surat berharga warga saat akan meninggalkan rumah huni mereka yang berada di KRB Gunung Merapi sesaat sebelum mengungsi.

Medium utama yang digunakan pada saat masa normal dan masa tanggap darurat adalah melalui *whatsapp* yang kecepatannya memadai agar pesan dapat diterima langsung oleh instansi terkait dan dapat diteruskan ke masyarakat secara berantai. Untuk program-program yang sedang dijalankan pemerintah, terdapat program BPBD Sleman yang dijalankan yaitu Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan Desa Tangguh Bencana (Destana) tidak diperbaharui setiap tahunnya dan program BPPTKG Yogyakarta yang dijalankan yaitu *sister village* (desa bersaudara) yang dalam persiapannya, seperti cenderung tidak belajar dari pengalaman erupsi Gunung Merapi 2010 dengan skala besar yang menetapkan desa aman dengan jarak radius 15 km, padahal pada tahun 2010 radius 15 km terkena dampak erupsi Gunung Merapi.

Daftar Pustaka

- Djamarah, Bahri, Syaiful. (2004). *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: PT Reneka Cipta.
- Rosady, Ruslan. (1998). *Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Eko Harry. (2011). *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta: ASPIKOM.
- Davis, Laura N Medfort, G Bobby Kapur. "Preparing for effective communications during disaster: lessons from a World Health Organization quality improvement project", *International Journal of Emergency Medicine*, (Maret 2014), hal. 1-7.
- Lestari, Puji, dkk, "Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat", *Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*, Vol. 10 No. 2 (Desember, 2013), hal. 139-158.
- Nakamura, Hiroki, Hisao Umeki, Takaaki Kato. "Importance of communication and knowledge of disasters in community-based disaster-prevention meetings", *Journal Science Direct*, Vol. 99 Part B, (Agustus 2016), hal. 235-243.
- Nurdin, Rudianto. "Komunikasi Dalam Penanggulangan Bencana", *Jurnal Simbolika: Research and Learning In Communication Study*, Vol. 1 No. 1 (April, 2015), hal. 51-61.

- Surono, et al. "The 2010 Explosive Eruption of Java's Merapi Volcano – A '100 Year' Event", *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, Vol. 241-242 (Oktober, 2012), hal. 121-135.
- Wahyudi, Firman. "Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam Mencegah dan Menanggulangi Bencana Asap di Riau", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2016), hal. 1-15.
- Astriani, Fiqih. (2017). "Mitigasi Bencana Gunung Merapi Berbasis Desa Bersaudara (*Sister Village*) di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Jawa Tengah." Skripsi Sarjana, Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Pasal 4, bagian c.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26, ayat 1, bagian b.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26, ayat 1, bagian c.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 33.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 34.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 48.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 57.
- Diaz. "Inilah Kronologi Letusan Dahsyat Merapi di Jumat Pagi." <http://m.tribunnews.com/amp/regional/2010/11/05/inilah-kronologi-letusan-dahsyat-merapi-di-jumat-pagi> (akses 27 Agustus 2017).

- “G. Merapi – Sejarah Letusan.”
<http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/542-g-merapi?start=1> (akses 25 Agustus 2017).
- Gultom, Dwie Irmawaty, Zita Joyce. “Crisis communication capacity for disaster resilience: Community participation of information providing and verifying in Indonesian volcanic eruption.”
http://www.communityresearch.org.nz/wp-content/uploads/formidable/Crisis_communication_capacity_for_disaster_resilience.pdf (akses 16 September 2017).
- Priyatmono, Eko. “BNPB: Dari 127 Gunung Aktif di Indonesia, 3 Masih Meletus.” <http://www.beritasatu.com/nasional/296381-bnpb-dari-127-gunung-aktif-di-indonesia-3-masih-meletus.html> (akses 25 Agustus 2017).
- Susilo, Budhi Kuswan. “Letusan Gunung Merapi : Antara Mitigasi Bencana dan Keyakinan Masyarakat.”
http://www.kompasiana.com/budhikuswansusilo/letusan-gunung-merapi-antara-mitigasi-bencana-dan-keyakinan-masyarakat_55003ac5813311e118fa7312 (akses 25 Agustus 2017).
- Swandewi, Dayu Mas. “Manajemen Sistem Informasi Dan Komunikasi Dalam Bencana.” <https://www.scribd.com/doc/283167346/Manajemen-Sistem-Informasi-Dan-Komunikasi-Dalam-Bencana#> (akses 22 September 2017).